

**KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP ANCAMAN
KEDAULATAN TIONGKOK DI LAUT NATUNA UTARA
TAHUN 2019–2024**

SKRIPSI



**DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Indonesia dalam merespons pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok di kawasan Laut Natuna Utara sepanjang periode 2019–2024. Fokus utama diarahkan pada bagaimana negara mengambil langkah-langkah pengamanan maritim (maritime securitization) dalam menghadapi ancaman keamanan multidimensional yang timbul dari klaim historis Tiongkok melalui konsep *nine-dashed line*. Penelitian mencoba mendeskripsikan kebijakan Indonesia terhadap pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, menggabungkan data primer dan sekunder melalui studi pustaka, dokumen kebijakan, serta pemberitaan dan laporan akademik. Kerangka teoritik yang digunakan mengkombinasikan Security Complex Theory dari Barry Buzan, yang membagi ancaman menjadi lima sektor, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tiga model analisis kebijakan luar negeri dari Graham Allison, yaitu *Rational Actor Model*, *Organizational Process Model*, dan *Governmental Politics Model*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran oleh Tiongkok telah memunculkan ancaman signifikan di kelima sektor keamanan tersebut. Respons Indonesia terhadap ancaman ini cenderung bersifat simbolik, diplomatis, serta institusional, dengan keterlibatan berbagai aktor negara. Namun, respons tersebut masih menghadapi tantangan koordinasi antar- lembaga dan tarik-menarik kepentingan birokratik. Secara umum, kebijakan Indonesia menunjukkan dualisme yang berupaya untuk menjaga kedaulatan tanpa memprovokasi konflik terbuka dengan Tiongkok, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan komprehensif lintas sektor.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Indonesia, Pelanggaran Kedaulatan, Laut Natuna Utara, Ancaman Keamanan, Model Analisis Kebijakan



ABSTRACT

This study aims to analyze Indonesia's policy response to sovereignty violations by China in the North Natuna Sea between 2019 and 2024. The main focus is on how the state undertakes maritime securitization in addressing multidimensional security threats arising from China's historical claims through the nine-dashed line concept. The research seeks to describe Indonesia's policy in addressing these sovereignty violations. A descriptive qualitative method is employed with a case study approach, combining primary and secondary data from literature review, policy documents, news coverage, and academic reports. The theoretical framework integrates Barry Buzan's Security Complex Theory, which categorizes threats into five sectors: military, political, economic, societal, and environmental, with Graham Allison's three models of foreign policy analysis: the Rational Actor Model, the Organizational Process Model, and the Governmental Politics Model. The findings indicate that China's incursions have posed significant threats across all five security sectors. Indonesia's responses tend to be symbolic, diplomatic, and institutional, involving various state actors. However, these responses face persistent challenges related to inter-agency coordination and bureaucratic competition. Overall, Indonesia's policy reflects a dualistic approach, aiming to assert sovereignty firmly while avoiding escalation into open conflict with China, but it has yet to fully adopt a cross-sectoral and comprehensive strategic framework.

Keywords: *Indonesia's Foreign Policy, Sovereignty Violation, North Natuna Sea, Security Threats, Foreign Policy Analysis Models*

